



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Tangerang I
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
C. Peran Strategis KPKNL Tangerang I	9
D. Sistematika Pelaporan	10
BAB II RENCANA KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	61
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
D. Kinerja Lain-Lain.....	62
BAB IV PENUTUP.....	66
LAMPIRAN.....	68

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari hasil setiap kegiatan yang dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tingkat keberhasilan yang diharapkan atau kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan setiap penugasan yang diberikan.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan KPKNL Tangerang I selalu dilandaskan pada visi yang telah ditetapkan yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL”.

Menjadi yang terbaik adalah harapan yang selalu terus akan diupayakan untuk dicapai yang tentunya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan dan harapan yang ada dan terjadi pada *stakeholder* pada umumnya dan khususnya masyarakat pengguna jasa KPKNL.

Perwujudan untuk menjadi yang terbaik dalam Tahun 2025 dituangkan dalam Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2025 guna memberikan gambaran atas pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi yang telah diemban. Laporan ini merangkum secara garis besar potret capaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam mendukung pemulihan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara. Kami menyadari bahwa setiap angka yang tercapai merupakan hasil kolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan serta kerja keras seluruh jajaran KPKNL Tangerang I.

Besar harapan kami, Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2025 ini dapat menjadi rujukan evaluasi yang konstruktif untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang lebih baik agar dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan bangsa.

Tangerang, 4 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik

Sunu Subroto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPKNL Tangerang I Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Tangerang I selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

NKO KPKNL Tangerang I

115,89

19 Total IKU			
19	0	0	0
Capaian Nilai Kerja Organisasi 2024			
Stakeholder Perspective (30%)			112,66
Customer Perspective (20%)			118,1
Internal Process Perspective (25%)			116,95
Learning and Growth Perspective (25%)			116,93
NKO Q4 2025			115,89

Pencapaian Kinerja KPKNL Tangerang I dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang disajikan melalui Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2025. Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I yang disusun pada tahun berisikan capaian kinerja selama periode tahun 2025 sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang **akuntabel, produktif, dan inovatif** dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan tuntutan yang tinggi yang saat ini terjadi pada masyarakat. Tindakan dan langkah untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menyederhanakan setiap kegiatan dan sistem administrasi sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari hasil yang dicapai. Langkah-langkah dalam tersebut dituangkan dalam misi DJKN sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I tahun 2025 menyajikan capaian dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama selama periode 2025.

Terdapat pula capaian lainnya antara lain:

1. Penghargaan atas Capaian Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan Tertinggi dari Kantor Wilayah DJKN Banten;
2. Penghargaan atas Pencapaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Biad PN) dan Penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara Tertinggi Tahun 2025 dari Kantor Wilayah DJKN Banten;
3. Penghargaan sebagai Pengelola Kearsipan Terbaik Tahun 2025;
4. Penghargaan sebagai Pengelola Kinerja Pegawai Terbaik Tahun 2025; dan
5. Penghargaan atas Pengelolaan Website dan Media Sosial Teraktif Tahun 2025.

Pada tahun 2026, KPKNL Tangerang I berharap mampu mendukung pencapaian tujuan strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Renstra DJKN melalui peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, layanan lelang, dan piutang negara yang profesional, modern, dan akuntabel. Fokus kinerja diarahkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama secara optimal, peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan berorientasi hasil. Melalui upaya tersebut, KPKNL Tangerang I berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam penciptaan nilai kekayaan negara dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari hasil setiap kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang diharapkan atau mendeteksi kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan setiap tugas.

Pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang didasarkan pada visi yang telah ditetapkan dan hendak dicapai oleh KPKNL Tangerang I sejalan dengan Visi DJKN, yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang **akuntabel, produktif, dan inovatif** dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”.

Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan tuntutan yang tinggi yang saat ini terjadi pada masyarakat. Tindakan dan langkah untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan setiap kegiatan dan sistem administrasi sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari hasil yang dicapai.

Tindakan dan langkah serta hasil yang dicapai merupakan tolok ukur keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau sesuai mandat yang diemban sehingga setiap langkah yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban atas setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I adalah unit operasional yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon I dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL Tangerang I berkedudukan di Kota Tangerang, dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan kekayaan negara dan lelang dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang merupakan fungsi operasional dari instansi vertikal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten.

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I 2025

KPKNL Tangerang I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang I menyelenggarakan fungsi yaitu:

- Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- Pelaksanaan pelayanan lelang;
- Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di atas, terdapat 28 (dua puluh delapan) orang pegawai pada KPKNL Tangerang I dengan struktur organisasi sebagai berikut.

- Subbagian Umum
- Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- Seksi Piutang Negara
- Seksi Hukum dan Informasi
- Seksi Kepatuhan Internal
- Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I 2025

Berikut adalah rincian jumlah pegawai berdasarkan golongan, jenis kelamin, dan jabatannya.

I. Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin :

No.	Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Total Orang
1.	I	0	0	0
2.	II	1	1	2
3.	III	9	12	21
4.	IV	4	1	5
TOTAL		14	14	28

II. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Eselon			
			II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	1	-	-
2	Subbagian Umum	7	-	-	1	6
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	3	-	-	1	2
5	Seksi Piutang Negara	2	-	-	1	1
7	Seksi Hukum dan Informasi	5	-	-	1	4
8	Seksi Kepatuhan Internal	2	-	-	1	1

III. Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Khusus

No	Bendahara	Pelelang	Penilai
1.	-	5	3

C. Peran Strategis KPKNL Tangerang I

KPKNL Tangerang I sebagai lembaga yang melayani penilaian, pengelolaan kekayaan negara, serta pengurusan piutang negara dan lelang, senantiasa mengupayakan tugas pelayanan

tersebut dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas tersebut diharapkan dapat memberikan hasil pada peningkatan pendapatan dari sektor penerimaan bukan pajak (PNBP) melalui pelelangan maupun pelunasan piutang negara, serta pemanfaatan kekayaan negara yang *idle* pada Kementerian/Lembaga.

Pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dapat menghasilkan penerimaan negara yang tentunya akan sangat strategis artinya bagi pembiayaan pembangunan dalam rangka memberikan layanan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Tangerang I membawa peran strategis tidak hanya bagi kepentingan pemerintah tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang dilayani.

Kepentingan-kepentingan tersebut terwakili pada instansi-instansi pengguna jasa KPKNL Tangerang I yaitu instansi pemerintah, perbankan serta masyarakat secara langsung yang memerlukan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

D. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2025 kami sajikan dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum tentang capaian kinerja tahun 2025, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN



02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis

Pelaporan kinerja instansi pemerintah didasarkan pada perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan perencanaan dari langkah-langkah yang akan ditempuh oleh instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik yang disusun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang saat ini dihadapi maupun yang akan timbul. Rencana strategis KPKNL Tangerang I terwujud dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mengantisipasi keadaan saat ini dan perkembangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Visi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam perencanaan strategis yang akan dicapai adalah "Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang **akuntabel, produktif, dan inovatif** dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan". Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Tangerang I menetapkan misi yang merupakan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang terdiri dari:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen perencanaan strategis Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan)

Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS 1			
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks Integritas	1a-CP	100
2.	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	1b-CP	100 (Rp 31,5 M)

SASARAN STRATEGIS 2			
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	2a-CP	100
2.	Persentase realisasi pokok lelang	2b-CP	100 (Rp 380,5 M)
3.	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	2c-CP	100 (Rp 4 M)

SASARAN STRATEGIS 3			
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan	3a-N	77
2.	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	3b-CP	74

SASARAN STRATEGIS 4			
Penerapan tata kelola aset yang efektif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	4a-CP	100
2.	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	4b-CP	100

SASARAN STRATEGIS 5			
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	5a-CP	100 (30)
2.	Tingkat kualitas layanan penilaian	5b-CP	70
3.	Persentase produktivitas lelang	5c-CP	80

SASARAN STRATEGIS 6			
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks kualitas kinerja anggaran	6a-CP	100
2.	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	6b-N	100
3.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	6c-N	80

SASARAN STRATEGIS 7			
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks penanganan permasalahan hukum	7a-CP	100
2.	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	7b-N	80

SASARAN STRATEGIS 8			
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	8a-N	80
2.	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	8b-N	100

Pada tahun anggaran 2025, telah dilakukan adendum perjanjian kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Tangerang I dengan perubahan pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Semula			Menjadi		
Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp 380,5 M)	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp 389,7 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp 4 M)	2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 (Rp 5 M)
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100 (30)	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	100 (33,5)

Proses *Alignment* Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2025 dengan Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025, serta standar nasional adalah sebagai berikut.

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I 2025

No	Rencana Strategis DJKN 2025-2029		Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029		Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2025		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPKNL Tangerang I (setelah adendum)	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Indeks Integritas	100	Indeks Integritas	100	Indeks Integritas	92	-	Indeks Integritas	100
2	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	-	-	Persentase realisasi penerimaan negara	100	-	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	-	-	-	-	-	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100
4	Persentase realisasi pokok lelang	100	-	-	-	-	-	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	-	-	-	-	-	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100
6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,2	-	-	-	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77
7	-	-	-	-	-	-	-	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100	-	-	-	-	-	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100
9	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100
10	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	-	-	-	-	-	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	-	-	-	-	-	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70
12	Persentase produktivitas lelang	80	-	-	-	-	-	Persentase Produktivitas Lelang	80
13	-	-	-	-	Nilai kinerja anggaran K/L	82,2	-	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
14	-	-	-	-	-	-	-	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100
15	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80

16	-	-	-	-	-	-	-	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
17	-	-	-	-	-	-	-	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
18	-	-	-	-	-	-	-	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80
19	-	-	-	-	-	-	-	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM	100

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2026 juga disusun mengacu pada dokumen perencanaan strategis Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2026 terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS 1			
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan	1a-CP	78
2.	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	1b-CP	100 (Rp 35 M)

SASARAN STRATEGIS 2			
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	2a-CP	100
2.	Tingkat efektivitas pembinaan	2b-N	80

SASARAN STRATEGIS 3			
Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	3a-CP	100 (Rp 5,5 M)
2.	Persentase realisasi kinerja lelang	3b-CP	100 (Rp 285 M)

SASARAN STRATEGIS 4			
Penerapan tata kelola aset yang efektif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I 2025

1.	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	4a-CP	100
2.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	4b-CP	100
3.	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	4c-N	100

SASARAN STRATEGIS 5			
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	5a-CP	100
2.	Tingkat kualitas layanan penilaian	5b-CP	80
3.	Persentase produktivitas lelang	5c-CP	85

SASARAN STRATEGIS 6			
Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	6a-N	100
2.	Indeks kualitas kinerja anggaran	6b-N	100
3.	Indeks pengelolaan BMN dan pengadaan	6c-N	100

SASARAN STRATEGIS 7			
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks efektivitas komunikasi publik	7a-CP	80
2.	Indeks penanganan permasalahan hukum	7b-CP	80

SASARAN STRATEGIS 8			
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
Indikator Kinerja		Kode IKU	Target
1.	Indeks integritas organisasi	8a-N	100
2.	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	8b-N	83

Proses *Alignment* Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2026 dengan Rencana Strategis DJKN Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2026, serta standar nasional adalah sebagai berikut.

No	Rencana Strategis DJKN 2025-2029		Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029		Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2026		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2026 KPKNL Tangerang I	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I 2025

1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,21	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,21			-	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	78
2	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase realisasi penerimaan negara	100			-	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
3	Persentase akurasi data IGT BMN	100	-	-			-	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
4	-	-	-	-			-	Tingkat efektivitas pembinaan	80
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	-	-			-	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100
6	-	-	-	-			-	Persentase realisasi kinerja Lelang	100
7	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100			-	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100			-	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100
9	-	-	-	-			-	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100
10	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	-	-			-	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	74	Tingkat kualitas layanan penilaian	72			-	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	80
12	Persentase produktivitas lelang	82	Persentase produktivitas lelang	80			-	Persentase Produktivitas Lelang	85
13	-	-	-	-			-	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
14	-	-	Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan	100			-	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
15	-	-	-	-			-	Indeks pengelolaan kearsipan	80
16	Indeks efektivitas komunikasi DJKN	100	-	-			-	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
17	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Indeks penanganan permasalahan hukum	100			-	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
18	Indeks Integritas	100	Indeks Integritas	100			-	Indeks integritas organisasi	100
19	-	-	-	-			-	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisas Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja KPKNL Tangerang I Tahun 2025 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran sasaran dan kinerja kegiatan. Evaluasi dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* KPKNL Tangerang I yang dituangkan dalam ikhtisar yang disebut dengan Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

19 Total IKU			
19	0	0	0
Capaian Nilai Kerja Organisasi 2024			
Stakeholder Perspective (30%)		112,66	
Customer Perspective (20%)		118,1	
Internal Process Perspective (25%)		116,95	
Learning and Growth Perspective (25%)		116,93	
NKO Q4 2025		115,89	

Pada tahun 2025, KPKNL Tangerang I memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) *Kemenkeu-Three* yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya;
2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
4. Penerapan tata kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Untuk mencapai 8 (delapan) SS tersebut, ditetapkan 19 (sembilan belas) IKU *Kemenkeu-Three* KPKNL Tangerang I. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar 115,89%, adapun rincian pencapaian Sasaran Strategis dan IKU *Kemenkeu-Three* KPKNL Tangerang I sebagai berikut:

SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

Sasaran strategis ini menekankan pada pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang dengan prinsip integritas tinggi dan adaptabilitas terhadap perubahan. Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan yang terpercaya melalui penerapan kebijakan yang akuntabel, efektif, dan memberikan nilai tambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. DJKN sebagai pengelola kekayaan negara dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah atas pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Integritas	1a-CP	100	105,32	105,32
2.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	1b-CP	100	133,85	133,85

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

1a-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

- Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN masa kerja minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan kriteria pengguna layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara *random/acak* dari populasi dengan memperhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

- 1) Internal
 - a) Perdagangan Pengaruh;
 - b) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) Pengelolaan SDM;
 - d) Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
 - e) Sosialisasi Anti Korupsi; dan
 - f) Transparansi.
- 2) Eksternal
 - a) Upaya Pencegahan Korupsi;
 - b) Transparansi dan Keadilan Layanan; dan

c) Integritas Pegawai.

Trajectory IKU Indeks integritas Tahun 2025 adalah

KPKNL	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
Tangerang I	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	100	100	120	120	105,32	105,32	
Capaian	100%	117%	117%	120%	120%	105,32%	105,32%	

Capaian IKU Indeks Integritas berdasarkan hasil survei SPI KPK yang telah dikalibrasi dengan faktor koreksi seperti kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT), hasil audit investigasi, pengondisian survei, informasi APH dan faktor apresiasi atau realisasi tindak lanjut hasil SPI 2024 dan kegiatan pencegahan antikorupsi selama 2025.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	105,32
2024	89,17	92	92	92	-	92,44
2023	88,67	91,5	91,5	91	-	89,17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90,5	90,5	90,5	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta Rencana Kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Integritas, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

1. Koordinasi informasi dengan PIC di Sekretariat DJKN terkait progress kegiatan SPI tahun 2025;
2. Menyampaikan informasi pelaksanaan FGD;
3. Monitoring pengisian survei SPI.

Target IKU Indeks Integritas **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Menyampaikan kepada pegawai pelaksanaan survei SPI;
2. Memonitoring pelaksanaan survei SPI;
3. Melaksanakan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh pegawai.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

1. *Integrity Week*: Menyediakan platform untuk diskusi, pelatihan, dan kampanye anti korupsi secara dua arah sehingga diharapkan dapat lebih diterima oleh pegawai khususnya generasi muda.
2. Sosialisasi Anti Korupsi Internal: Program terstruktur yang melibatkan pejabat dan pegawai di seluruh unit kerja.
3. Sosialisasi Anti Korupsi Eksternal: Program terstruktur yang melibatkan masyarakat.
4. Peningkatan Tata Kelola Aplikasi: Pengembangan fitur aplikasi layanan DJKN untuk mendukung transparansi dan efisiensi (sarana pengaduan wise.kemenkeu.go.id).
5. Diseminasi Nilai Integritas: Publikasi nilai-nilai antikorupsi melalui media sosial dan saluran komunikasi resmi

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	7.948.000	6.332.884	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Kegiatan dalam **memitigasi risiko** atas pencapaian IKU ini antara lain berkoordinasi mengenai informasi dengan PIC di Sekretariat DJKN terkait *progress* kegiatan SPI tahun 2025 dan pelaksanaan FGD.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu kebijakan penilaian yang sangat dinamis dan bervariasi antar tim penilai KemenpanRB sehingga mempengaruhi proses pemenuhan kelengkapan dokumen oleh unit kerja.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Adapun **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain penguatan sistem pemantauan dan peningkatan keterlibatan pegawai dalam penguatan integritas.

1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-

undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang lingkup KPKNL Tangerang I berasal dari:

1. PNBP Kekayaan Negara (PNBP Aset)
 - a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
 - b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada Kementerian dan/atau Lembaga bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
2. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)
 Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara.
3. PNBP Lelang berupa:
 - a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
 - b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
 - c. biaya permohonan lelang;
 - d. uang jaminan pembeli wanprestasi; dan
 - e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Trajectory IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2025 adalah:

KPKNL	SS.1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
Tangerang I	1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
	Rp2.813,5	Rp9.460,1	Rp9.460,1	Rp19.447,8	Rp19.447,8	Rp31.514	Rp31.514	
Realisasi	Rp6.091	Rp15.538,7	Rp15.538,7	Rp28.200,8	Rp28.200,8	Rp42.181,7	Rp42.181,7	
Capaian	216,49%	164,26%	164,26%	145%	145%	133,85%	133,85%	

Raw data dalam juta Rupiah

Capaian penerimaan kekayaan negara secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Jenis PNBP	Target 2025	Realisasi 2025 (Rp)	Indeks Capaian Tanpa Batas
1	PNBP Aset	Rp20.810.000.000	Rp23.194.638.355	111,46%
2	PNBP Lelang	Rp10.682.000.000	Rp18.948.229.398	177,38%
3	PNBP Piutang Negara	Rp22.000.000	Rp38.905.074	176,84%
		Rp31.514.000.000	Rp42.181.772.827	133,85%

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	100	-	133,85
2024	100	100	100	100	-	204,22
2023	100	100	100	100	-	111,93

2022	100	100	100	100	-	180,41
2021	100	100	100	100	-	220,35

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta Rencana Kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan monitoring data OMSPAN secara berkala;
2. Melakukan FGD dengan Satuan Kerja yang memiliki Potensi PNBPN;
3. Melakukan Sosialisasi Pemanfaatan BMN ke Satuan Kerja di Wilayah KPKNL Tangerang I;
4. Melakukan penggalan potensi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN pada Satuan Kerja, Kejaksaan dan BLU lingkup KPKNL Tangerang I
5. Penagihan bersama dengan penyerah piutang;
6. Koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang;
7. Penggalan potensi lelang kepada pelaku UMKM.

Target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan penggalan potensi pada Satuan Kerja di Wilayah KPKNL Tangerang I terkait penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara;
2. Melakukan penggalan potensi pada Badan Layanan Umum di Wilayah KPKNL Tangerang I terkait penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara;
3. Melakukan penggalan potensi pada Kejaksaan di Wilayah KPKNL Tangerang I terkait penerimaan negara dari Barang Rampasan;
4. Pelatihan optimalisasi BMN kepada Satuan Kerja;
5. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK;
6. Penagihan piutang negara secara langsung kepada debitur;
7. Mengadakan kegiatan sosialisasi terkait crash program 2025;
8. Penggalan potensi lelang kepada perbankan dan kejaksaan;
9. Rapat koordinasi dan melaksanakan FGD dengan *stakeholder* lelang;

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan terlaksananya berbagai **program/kegiatan** antara lain:

1. Sosialisasi mengenai ketentuan atau peraturan berkaitan dengan pengelolaan BMN, khususnya pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN;
2. Penggalan potensi lelang kepada *stakeholder*;
3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik, minimal bulanan;
4. Melakukan penarikan data realisasi PNBPN yang bersumber dari OMSPAN dan Dropbox untuk dilakukan verifikasi;
5. Forum Komunikasi Publik Kanwil DJKN Banten 2025;
6. Asset Talk Kanwil DJKN Banten 2025.

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	71.124.000	65.657.500	Telah dihasilkan Keputusan Permohonan Pengeolaan Kekayaan Negara
2.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	57.562.000	43.375.000	Telah dihasilkan berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara
3.	Risalah Lelang	23.938.000	21.482.000	Telah dihasilkan Risalah Lelang
4.	Penggalian Potensi Lelang	6.424.000	3.256.500	Telah dilaksanakan penggalian potensi lelang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain:

1. Sosialisasi optimalisasi BMN;
2. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
3. Penggalian potensi lelang;
4. Sosialisasi terkait lelang dan piutang negara.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Penerimaan terbesar berasal dari PNBP Rampasan Kejaksaan dan PNBP dari BLU;
2. Masih rendahnya pemahaman terkait pemanfaatan Barang Milik Negara yang berkaitan dengan masih terdapat PNBP yang diterima oleh Satuan Kerja namun tidak masuk kedalam data OMSPAN;
3. Pelunasan piutang negara tergantung dari kemampuan debitur;
4. Tidak adanya barang jaminan pada saat penyerahan piutang negara;
5. Data debitur piutang negara yang tidak lengkap;
6. Jumlah barang yang tidak laku lelang cukup tinggi.

Dalam pencapaian target IKU, prinsip **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang gender;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang.

Dukungan IKU ini terhadap **upaya** Pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden yaitu optimalisasi BMN untuk mendukung program MBG melalui SPPG dan Koperasi Merah Putih.

Adapun **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Penggalian potensi pemanfaatan BMN dari Pengelolaan BMN, Rampasan dan BLU, serta sosialisasi terkait pengelolaan BMN kepada Satuan Kerja
2. Meningkatkan sinergi dengan satuan kerja dalam pengelolaan BMN;
3. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
4. Berkoordinasi dengan satuan kerja dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Penggalian Potensi PNBP pada satuan kerja;

6. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait lelang.

SS.2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

Sasaran ini mencakup optimalisasi aset negara dan layanan lelang. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, menurunkan saldo piutang negara, dan memastikan penerimaan negara dari lelang tercapai secara maksimal. Optimalisasi ini bertujuan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan keuangan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	2a-CP	100	126,66	126,66
2.	Persentase realisasi pokok lelang	2b-CP	100 (Rp 389,7 M)	126,8 (Rp 494,1 M)	126,8
3.	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	2c-CP	100 (Rp 5 M)	105,89 (Rp 5,3 M)	105,89

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Trajectory IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	Nama IKU: Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	33,33%	100%	100%	126,67%	126,67%	126,66%	126,66%	
Capaian	66,67%	166,67%	166,67%	158,34%	158,34%	126,66%	126,66%	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	126,66

2024	71,5	70	70	70	-	99,54
2023	68	65	65	65	-	98,06
2022	65	60	60	60	-	76
2021	62	57	57	57	-	74,87

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, pada tahun 2021-2024 terdapat proses **alignment** dengan antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta Rencana Kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya yaitu untuk kegiatan Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK). Sedangkan untuk Standar Nasional, Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029, dan Rencana Kerja Kemenkeu 2025 tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu koordinasi terkait pengisian *form* tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada Satuan Kerja target optimalisasi BMN dan pelaksanaan sosialisasi terkait optimalisasi BMN kepada Satuan Kerja.

Target IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja dan melakukan monitoring terhadap data BMN yang menjadi target optimalisasi BMN.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** berupa mendorong Satuan Kerja untuk melakukan optimalisasi dalam bentuk usulan tarif pemanfaatan BMN untuk *open table/commercial space*.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK telah dilakukan secara efisien, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian target output sesuai dengan yang direncanakan dan hasil pengukuran juga sesuai dengan target yang ditetapkan. Disamping itu, pencapaian target output dan target nilai pengukuran tetap dapat diraih meskipun terdapat kebijakan penghematan anggaran pada tahun berjalan.

Mitigasi risiko yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini yaitu melakukan identifikasi potensi pemanfaatan pada Satuan Kerja dan berkoordinasi terkait pemutakhiran data form SBSK pada Satuan Kerja.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu BMN telah optimal digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi operasional Satuan Kerja sehingga sulit untuk menentukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan lain.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Dukungan IKU ini terhadap **upaya** Pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden yaitu optimalisasi BMN untuk mendukung program MBG melalui SPPG dan Koperasi Merah Putih.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain berkoordinasi dalam pengisian formulir pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada Satuan Kerja dan melakukan penggalan potensi pemanfaatan pada Satuan Kerja.

2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dan Lelang Pegadaian dalam periode tertentu.

Trajectory IKU **Persentase Realisasi Pokok Lelang** Tahun 2025 adalah:

KPKNL		Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
Tangerang I		Nama IKU: Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
	Rp38.053	Rp114.161	Rp114.161	Rp247.350	Rp247.350	Rp 389.700	Rp 389.700	
Realisasi	Rp95.075	Rp232.716	Rp232.716	Rp390.100	Rp390.100	Rp494.144	Rp494.144	
Capaian	249,84%	203,84%	203,84%	157,71%	157,71%	126,8%	126,8%	

Raw data dalam juta Rupiah

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (renja), dan Standar Nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	126,8
2024	100	100	-	-	-	265,05
2023	100	100	-	100	-	86,04
2022	100	100	-	100	-	118,86
2021	100	100	-	100	-	216,71

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta Rencana Kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu koordinasi intensif dan penggalan potensi lelang kepada *stakeholder* lelang.

Target IKU Persentase Persentase Realisasi Pokok Lelang **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain penggalan potensi lelang kepada perbankan dan kejaksaan serta pelaksanaan rapat koordinasi dan FGD dengan *stakeholder* lelang.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

1. Penggalan potensi lelang kepada *stakeholder*;
2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada KPKNL dengan periodik tertentu minimal bulanan;
3. Melakukan penarikan data realisasi PNPB yang bersumber dari OMSPAN dan Dropbox untuk dilakukan verifikasi.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Risalah Lelang	23.938.000	21.482.000	Telah dihasilkan Risalah Lelang
2.	Penggalan Potensi Lelang	6.424.000	3.256.500	Telah dilakukan penggalan potensi lelang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini antara lain penggalan potensi lelang dan koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang.

Namun, masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu jumlah barang yang tidak laku lelang cukup tinggi.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain penggalan potensi lelang kepada *stakeholder* dan peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait lelang.

2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan *outstanding* BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I 2025

1. PNDS/Piutang Negara dapat Disetor (Angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Trajectory IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara Tahun 2025 adalah:

KPKNL	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
Tangerang I	Nama IKU: Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
	Rp400	Rp1.200	Rp1.200	Rp2.400	Rp2.400	Rp5.051	Rp5.051	
Realisasi	Rp1.164	Rp1.721	Rp1.721	Rp5.051	Rp5.051	Rp5.348	Rp5.348	
Capaian	291,03%	143,44%	143,44%	210,48%	210,48%	105,89%	105,89%	

Raw data dalam juta Rupiah

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	105,89
2024	100	-	-	100	-	316,08
2023	100	-	-	100	-	232,47
2022	100	-	-	-	-	219,87
2021	100	-	-	-	-	10,75

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, telah disampaikan proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta Rencana Kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan optimalisasi tahap proses pengurusan pada setiap BKPN, yaitu penerbitan Surat Paksa dan Penyampaian Surat Paksa kepada debitur;
2. Mengadakan Sosialisasi pengurusan piutang dan *crash program*;
3. Menjadi narasumber terkait PP 28/202 kepada satuan kerja;
4. Penagihan bersama dengan penyerah piutang;
5. Koordinasi dengan pihak terkait yaitu dinas kependudukan, kantor pertanahan dan kantor pajak.

Target IKU sentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pada saat penyampaian Surat Paksa dapat dilakukan *mapping* kondisi debitur yang sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga pengurusan Piutang dapat dilanjutkan atau di PSBDT-kan;
2. Intensifikasi pengurusan piutang dengan melaksanakan penelitian lapangan dan pemeriksaan;
3. Pengurusan sederhana;
4. Melakukan rekonsiliasi BKN;
5. Mengadakan sosialisasi *crash program* kepada *stakeholder*.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	57.562.000	43.375.000	Telah dihasilkan berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini yaitu mengadakan sosialisasi terkait Piutang Negara kepada satuan kerja dan menambah SDM Pemeriksa, Jurusita, dan SDM di seksi Piutang Negara.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Data BKN yang tidak lengkap;
2. Nilai BKN yang tidak signifikan;
3. BKN tidak disertai barang jaminan;
4. Koordinasi yang masih belum optimal dengan pihak terkait terutama terkait penyelesaian permohonan data kependudukan dan blokir;
5. Keterbatasan SDM dan pendanaan.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Adapun **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Mendorong pelunasan debitur yang masih aktif;
2. Optimalisasi pengurusan piutang negara dengan meningkatkan tahap proses pengurusan piutang negara;
3. Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengelolaan Piutang Negara/Daerah (PP 28/2022);
4. Koordinasi dengan satuan kerja terkait penyelesaian piutang negara.

SS.3 Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dalam

pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

Indikator Kinerja		Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan	3a-N	77	96,19	124,93
2.	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	3b-CP	74	97,31	131,50

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Seksi Kepatuhan Internal. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut.

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana Prasarana
9. Sarana Pengaduan

Hasil Survei dituangkan dalam perhitungan berikut.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Trajectory IKU Indeks kepuasan pengguna layanan Tahun 2025:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
	Nama IKU: Indeks kepuasan pengguna layanan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/ TLK
Realisasi	95,78	94,60	95,19	97	95,79	97,4	96,19	
Capaian	124,38%	122,85%	123,62%	125,97%	124,40%	126,49%	124,92%	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	77	4,2	4,2	-	-	96,19
2024	-	4,2	4,2	4,2	-	-
2023	-	4,15	4,15	4,15	-	-
2022	4,58	4,1	4,10	4,10	-	4,77
2021	4,57	4,05	4,05	4,05	-	4,67

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan adalah mengoptimalkan koordinasi formal dan informal dengan seluruh satuan kerja penerima layanan dengan memanfaatkan *barcode/link* dalam pengisian survei.

Target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan **berhasil** dicapai dengan baik karena kolaborasi yang kuat antara KPKNL Tangerang I dengan *stakeholder*.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** antara lain sosialisasi tata cara pengisian survei kepada petugas satuan kerja Kuasa Pengguna Barang dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan survei indeks kepuasan pengguna layanan telah dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan fitur *barcode* dan/atau tautan untuk pengisian survei.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain melaksanakan edukasi kepada para pengguna layanan untuk meningkatkan pemahaman pengguna layanan terkait dengan SOP dan persyaratan layanan.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pemahaman pengguna layanan terkait dengan SOP dan persyaratan layanan masih kurang.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;

- Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana telah ditempuh dalam kurun waktu tahun 2025 dan melakukan upaya perbaikan bilamana diperlukan untuk menyesuaikan dengan peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2026.

3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini terdiri dari 2 komponen yaitu tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang dan indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara.

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan *stakeholder* dan internal DJKN terhadap ketentuan dan layanan terkait pengelolaan kekayaan negara dan lelang sehingga berdampak pada optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Trajectory IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2025.

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	Nama IKU: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Poi/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	135,13%	135,13%	135,13%	135,13%	135,13%	135,13%	135,13%	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	74	-	-	-	-	100
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	94	-	-	-	-	98,09
2021	93,5	-	-	-	-	98,45

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, tidak terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, serta Standar Nasional.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah

dilakukan yaitu membuat kerangka acuan kerja bimtek/sosialisasi dan memetakan Satuan Kerja/*audience* yang menjadi target.

Target IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi **berhasil** dicapai dengan baik karena kolaborasi yang kuat antara KPKNL Tangerang I dan *stakeholder*. Selain itu, didukung juga dengan optimalisasi sumber daya manusia di lingkup KPKNL Tangerang I.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** bimbingan teknis dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bidang PN dan para Pelelang di lingkup KPKNL Tangerang I.

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini, KPKNL Tangerang I mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada DIPA dan juga sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan SOP dan harapan pengguna layanan.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain melaksanakan edukasi kepada para pengguna layanan untuk meningkatkan pemahaman pengguna layanan terkait dengan SOP dan persyaratan layanan.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pemahaman pengguna layanan terkait dengan SOP dan persyaratan layanan masih kurang.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana telah ditempuh dalam kurun waktu tahun 2025 dan melakukan upaya perbaikan bilamana diperlukan untuk menyesuaikan dengan peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2026.

SS.4 Penerapan tata kelola aset yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam Siklus BMN, diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Penerapan tata kelola aset dikatakan efektif apabila penerapan pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik, tunduk pada peraturan yang berlaku, dan memberikan hasil/*outcome* yang tepat guna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	4a-CP	100	137,5	137,5
2.	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	4b-CP	100	110	110

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Trajectory IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	Nama IKU: Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po//KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	137,5%	208,7%	208,7%	150%	150%	137,5%	137,5%	
Capaian	2.750%	521,74%	521,74%	250%	250%	137,5%	137,5%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	137,5
2024	100	100	-	100	-	133,51
2023	100	100	-	100	-	128,46
2022	100	100	-	100	-	103,39
2021	100	100	-	-	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh satker pemilik target K1;
2. Berkoordinasi dengan beberapa *stakeholders* (Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, Ahli Waris, PUPR);

3. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan agar dokumen permohonan Satuan Kerja yg telah lengkap untuk dapat segera dilakukan pengukuran sambil menunggu Surat Keputusan Penlok terbit.

Target IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan **berhasil** dicapai dengan baik dikarenakan sinergi yang baik dengan dengan Kantor Pertanahan, Satuan Kerja, dan *stakeholders* lain serta terdapat capaian kategori K4 (*update* data SIMAN) yang dapat membantu meningkatkan capaian target sertipikasi secara keseluruhan

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** yaitu mendorong Satuan Kerja untuk melakukan *update* data sertipikat tanah di SIMAN hingga dinyatakan valid serta berkoordinasi dan melakukan sosialisasi kepada Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	8.301.000	8.008.000	Telah dilaksanakan program pensertipikatan BMN berupa tanah dengan capaian sertipikat

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini antara lain melakukan identifikasi dokumen perolehan tanah BMN pada Satuan Kerja dan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait sengketa/permasalahan tanah.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu KPKNL Tangerang I hanya sebagai penghubung antara Satuan Kerja yang memiliki BMN berupa tanah yang belum disertipikatkan atau sertifikatnya belum sesuai ketentuan dengan Kantor Pertanahan, sehingga tingkat kendalanya rendah serta terdapat BMN tanah yang pada saat pelaksanaan diketahui belum free and clear sehingga belum dapat dilaksanakan sertifikasi, sehingga harus mencari target bidang tanah baru untuk disertipikatkan.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Adapun **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja pemilik target kategori K1;
2. Berkoordinasi dengan beberapa *stakeholders* (Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, Ahli Waris);
3. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk dapat segera menerbitkan Surat Keputusan Penlok.

4b-CP Persentase Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa persetujuan pengelola barang.

Adapun *trajectory* IKU **Persentase Evaluasi Kinerja BMN** Tahun 2025 adalah:

KPKNL	Nama Sasaran Strategis: Penerapan tata kelola aset yang efektif							
Tangerang I	Nama IKU: Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max TLK
Realisasi	120%	113,75%	113,75%	112,5%	112,5%	110%	110%	
Capaian	800%	227,5%	227,5%	150%	150%	110%	110%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	110
2024	100	100	-	-	-	124,69
2023	100	100	-	-	-	117,25
2022	100	100	-	-	-	100
2021	100	100	-	-	-	111,11

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2021-2024. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, serta Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), telah dilaksanakan **kegiatan** yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah

dilakukan antara lain mengidentifikasi dan melakukan evaluasi kinerja BMN pada Satuan Kerja yang memiliki aset berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2010104001) dan Bangunan Gedung Kantor Permanen (4010101001).

Target IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) **berhasil** dicapai dengan baik karena berdasarkan Nota Dinas Direktur PKN Nomor ND-59/KN.2/2025 tanggal 13 Januari 2025 bahwa jenis objek Evaluasi Kinerja BMN diutamakan berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2010104001) dan Bangunan Gedung Kantor Permanen (4010101001).

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	8.510.000	7.832.000	Telah berhasil melakukan evaluasi BMN

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini antara lain mengidentifikasi dan melakukan evaluasi kinerja BMN pada Satuan Kerja yang memiliki aset berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2010104001) dan Bangunan Gedung Kantor Permanen (4010101001).

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu penyelesaian target Komponen A (jumlah aset yang dievaluasi) terhambat karena jenis BMN yang menjadi target evaluasi terbatas (hanya berupa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor).

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Adapun **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melakukan evaluasi kinerja BMN pada Satuan Kerja dan mendorong Satuan Kerja untuk menyampaikan tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi kinerja BMN dimaksud.

SS.5 Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Sasaran ini memastikan pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilakukan secara profesional untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas. Dengan layanan berbasis kompetensi dan produktivitas tinggi, sasaran ini bertujuan mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	----------	--------	-----------	---------

1.	Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara	5a-CP	100	116,72	116,72
2.	Tingkat kualitas layanan penilaian	5b-CP	70	103,63	148,04
3.	Persentase produktivitas lelang	5c-CP	80	120	150

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara

IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda. Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemerintah Daerah yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa:

1. BKPN Lunas (SPPNL);
2. BKPN Penarikan (SPPNS);
3. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
7. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan

telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan *review* oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

Trajectory IKU **Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara** Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Nama IKU: Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max TLK
Realisasi	480%	128,57%	128,57%	120%	120%	116,72%	116,72%	
Capaian	480%	128,57%	128,57%	120%	120%	116,72%	116,72%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	-	-	-	116,72
2024	60	100	-	-	-	38,83
2023	-	100	-	100	-	-
2022	-	100	-	100	-	-
2021	-	100	-	100	-	-
2020	-	100	-	100	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain mendorong pelunasan piutang negara serta mengusulkan PSBDT atas debitur yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak mempunyai jaminan.

Target IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain melakukan optimalisasi peningkatan tahap pengurusan Piutang Negara dan melakukan penagihan secara optimal.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sosialisasi Peraturan Piutang Negara dan rekonsiliasi BKPN dengan Debitur.

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	57.562.000	43.375.000	Telah dihasilkan berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini yaitu melakukan penggalan potensi penyerahan BKPN dan melakukan penagihan *on the spot*.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu penyerahan BKPN yang berkurang dan minimnya kemampuan debitur dalam melunasi hutangnya.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;

3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Adapun **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

1. Mendorong pelunasan debitur yang masih aktif;
2. Optimalisasi pengurusan piutang negara dengan meningkatkan tahap proses pengurusan piutang negara;
3. Penggalian potensi piutang negara.

5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan, transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan penilaian yang akuntabel dan profesional diukur melalui layanan penilaian yang tepat waktu, basis data yang akurat dan hasil penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Indikator penilaian yang akuntabel & profesional adalah sebagai berikut.

1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)
Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.
2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%)
Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%)
Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85.
Target 2025: 80% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang di SIP

Trajectory IKU **Tingkat kualitas layanan penilaian** Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Nama IKU: Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max AVG
Realisasi	111,75%	95,5%	103,63%	102,11%	102,87%	105,15%	103,63%	
Capaian	159,64%	136,42%	148,04%	145,87%	146,95%	150,21%	148,04%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	70	70	-	-	-	103,63%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, tidak terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya dan Standar Nasional.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan pemohon penilaian terkait kelengkapan dokumen penilaian dan berkoordinasi dengan PFPP yang ada di lingkungan Kanwil DJKN Banten untuk meminta bantuan penilaian terkait banyaknya permohonan penilaian dalam suatu waktu.

Target IKU Tingkat kualitas layanan penilaian **berhasil** dicapai dengan baik karena kolaborasi yang baik dengan seluruh penilai di lingkup KPKNL Tangerang I. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** perbantuan penilaian antar KPKNL di Kanwil DJKN Banten.

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rekomendasi Hasil Penilaian	16.452.000	16.302.000	Telah disusun Rekomendasi di Bidang Penilaian berupa Laporan Penilaian

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain penjadwalan permohonan penilaian dengan menyesuaikan beban kerja penilai dan berkoordinasi antar PFPP untuk mengerjakan penilaian secara bersama-sama

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Banyaknya permohonan penilaian dari Satuan Kerja terkait penilaian BMN, aset rampasan Kejaksaan maupun pemerintah daerah.
2. Permohonan penilaian dari Satuan Kerja terkait penilaian sewa maupun penilaian BMN dengan kategori penilaian sederhana dan non sederhana. Penilaian sederhana misalnya penilaian BMN seperti bongkaran atau kendaraan bisa dikerjakan secara individu. Penilaian yang kompleks seperti penilaian tanah yang luas atau jumlah obyek penilaian dalam jumlah besar tidak bisa dikerjakan secara individu, jadi harus dikerjakan secara tim.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*,

2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah merencanakan pelaksanaan penilaian di lapangan dengan membagi beban tugas kepada semua PFPP dan memastikan penilaian dilaksanakan sesuai SOP.

5c-CP Persentase Produktivitas Lelang

Tujuan dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang. Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai berikut:

1. lelang noneksekusi sukarela: 75%;
2. lelang noneksekusi wajib: 55%;
3. lelang eksekusi HT: 5%;
4. lelang eksekusi selain HT: 25%.

Trajectory IKU **Persentase Produktivitas Lelang** Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	Nama IKU: Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max AVG
Realisasi	55,84%	81,71%	81,71%	113,61%	113,61%	120%	120%	
Capaian	186,13%	204,27%	204,27%	162,3%	162,3%	150%	150%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	80	-	-	-	120
2024	89	34	-	80	-	120
2023	80	34	-	36	-	131,25
2022	36	34	-	-	-	38,93
2021	35	34	-	-	-	42,36

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di tahun 2023-2024. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Produktivitas Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu

koordinasi intensif dengan stakeholder lelang dan penggalian potensi lelang kepada pelaku UMKM.

Target IKU Persentase Produktivitas Lelang **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penggalian potensi lelang kepada perbankan dan kejaksaan;
2. Rapat koordinasi dan FGD dengan *stakeholder* lelang;
3. Sosialisasi lelang kepada para pelaku UMKM wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang dan juga penggalian potensi lelang.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Risalah Lelang	23.938.000	21.482.000	Telah dihasilkan Risalah Lelang
2.	Penggalian Potensi Lelang	6.424.000	3.256.500	Telah dilakukan penggalian potensi lelang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain melakukan penggalian potensi lelang dan koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu jumlah barang yang tidak laku lelang cukup tinggi.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melakukan penggalian potensi lelang *stakeholder* dan berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait lelang.

SS.6 Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien menjadi fokus sasaran ini, dengan didukung pengembangan kompetensi pegawai untuk menghadapi tantangan organisasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini bertujuan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	----------	--------	-----------	---------

1.	Indeks kualitas kinerja anggaran	6a-CP	100	120	120
2.	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	6b-N	100	125,22	125,22
3.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	6c-N	80	93,20	116,5

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut.

6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan anggaran. Komponen yang diukur dalam IKU Indeks kualitas kinerja anggaran mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ruang lingkup perhitungan Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Adapun *trajectory* IKU Indeks kualitas kinerja anggaran Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Nama IKU: Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max AVG
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	120	-	-	82,2	-	120
2024	100	95	-	95,5	-	100
2023	100	95	-	95	-	120
2022	95,5	95	-	95	-	92,30
2021	95,5	95	-	95	-	95,72

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar segera menyelesaikan

pertanggungjawaban keuangan dan berkoordinasi dengan tiap seksi terkait rencana pelaksanaan anggaran.

Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan penyerapan/belanja sesuai dengan rencana pada Halaman III DIPA yang telah ditetapkan;
2. Mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran agar capaian sesuai dengan target triwulanan yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan pendaftaran Kontrak ke KPPN maksimal 2 hari kerja setelah penandatanganan kontrak;
4. Melakukan percepatan pembukuan/pencatatan transaksi dan pertanggungjawaban Uang Persediaan (minimal melakukan *revolving* UP 1 kali setiap bulannya);
5. Melakukan pemantauan atas pencapaian *output* dan memastikan semua target *output* tercapai.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut:

1. Layanan Bimbingan APK *Online*;
2. Bimbingan teknis seputar Laporan Keuangan/Pengelolaan Anggaran;
3. Pelatihan jarak jauh seputar tugas dan fungsi keuangan;
4. *Focus group discussion* penganggaran dan pelatihan modul Sakti.

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	2.187.005.000	2.073.635.360	Telah disusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Unit, diantaranya berupa Renja, RKA-K/L, Proposal PNBP, dan lainnya.

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini antara lain menyampaikan kepada tiap PIC terkait hasil monitoring penyerapan anggaran dan memantau capaian *output* yang belum tercapai.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu perubahan SDM khususnya Bendahara dapat mempengaruhi rencana dan strategi yang telah disusun.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Adapun **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain memberikan *early warning* pemenuhan target penyerapan dan deviasi Halaman III DIPA.

6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU ini mengukur komponen yang terdiri dari kualitas pengelolaan pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri) dan indeks tata kelola pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Adapun *trajectory* IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Nama IKU: Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max AVG
Realisasi	160%	111,43%	111,43%	112,5%	112,5%	125,22%	125,22%	
Capaian	160%	111,43%	111,43%	112,5%	112,5%	125,22%	125,22%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	100	-	-	100	-	120
2023	100	-	-	-	-	120
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja dengan rencana kerja Kementerian Keuangan tahun 2024. Sedangkan untuk Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

1. Pendekatan proaktif dengan *stakeholder*. Berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi hambatan administratif terkait pengurusan dokumen lahan;
2. Melakukan monitoring ketat di lapangan: Peningkatan frekuensi inspeksi untuk memastikan kualitas pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan pagar sesuai spesifikasi.

Target IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Komitmen dari Tim Pengadaan: Seluruh anggota tim menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas secara profesional dan tepat waktu.
2. Kerjasama dengan *stakeholder*: Dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perumahan, kontraktor, dan konsultan pengawas memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran proses pengadaan;
3. Sistem digitalisasi proses pengadaan: Penggunaan aplikasi e-katalog yang mendukung transparansi dan efisiensi pelaksanaan pengadaan.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** antara lain melakukan inventarisasi fisik dan pembenahan pencatatan BMN di SIMAN dan melakukan 2 kali lelang penghapusan BMN sebagai langkah untuk mengurangi BMN yang telah rusak.

Sedangkan **efisiensi** atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan penggunaan teknologi sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran yang optimal: Pencapaian hasil pekerjaan sebesar 98% dari target dengan penggunaan anggaran hanya sebesar 95% dari total yang dialokasikan.
2. Penggunaan teknologi: Pengaplikasian metode digitalisasi pada survei lahan dan pengelolaan dokumen mengurangi waktu serta biaya administrasi hingga 20%.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain melakukan penyelarasan catatan di SIMAN dengan fisik BMN dan penyelarasan RKBMN dengan RKAKL.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu target P3DN Kementerian Keuangan sebesar 95% yang masih memerlukan peningkatan dalam penyusunan data dukung capaian P3DN untuk laporan RB dan pelaksanaannya. Hal ini karena minimnya monitoring berkala atas P3DN.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melakukan monitoring dan evaluasi berkala.

6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 jamlat (1 jamlat adalah 45 menit), minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jenis Pengembangan Kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhannya dilakukan berdasarkan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada

usulan diklat pada modul DKI/IPR. Rencana pengembangan kompetensi tersebut disepakati bersama antara pegawai dengan atasannya.

Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon IV/JF setara dan pelaksana/JF setara. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

1. bawahan yang akan pensiun di tahun 2025;
2. bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
3. bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2025;
4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2025 tidak diperhitungkan di unit barunya;
5. Pegawai pada unit non-eselon.

Adapun *trajectory* IKU **Persentase pengembangan kompetensi pegawai** Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	Nama IKU: Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max AVG
Realisasi	26,44%	26,44%	68,07%	68,07%	84,67%	93,20%	93,20%	
Capaian	132,22%	132,22%	170,19%	170,19%	141,11%	116,5%	116,5%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	93,2
2024	90	-	-	-	-	120
2023	100	-	-	-	-	100
2022	100	-	-	-	-	120
2021	100	-	-	-	-	120

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, tidak terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain monitoring secara berkala pelaksanaan diklat yang diikuti pegawai dan memberikan pembelajaran/seminar/webinar yang diselenggarakan secara bersama seluruh pegawai.

Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai **berhasil** dicapai dengan baik karena seluruh pegawai KPKNL Tangerang I telah memenuhi kompetensi sesuai bidangnya.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** sebagai berikut.

1. Mengingatkan pegawai untuk mengusulkan diklat dengan melalui aplikasi diklat;
2. Mengingatkan pegawai untuk mengikuti diklat atau pembelajaran secara mandiri melalui *Kemenkeu Learning Center (KLC)* atau *e-learning*;
3. Kepala Kantor selalu mendorong dan memonitor pegawai untuk selalu melakukan pembelajaran.

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan pendidikan/pelatihan secara *online* yang tentu sangat menghemat anggaran.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini antara lain melakukan pemetaan pegawai dan pengusulan untuk diklat yang mengembangkan kompetensinya, terutama untuk jabatan-jabatan yang harus sertifikasi.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu kurangnya minat pegawai dalam mengikuti diklat dan pelaksanaan pelatihan sering berbenturan dengan penugasan lain.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Guna meningkatkan kinerja di 2025, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melakukan pemetaan pegawai dan pengusulan untuk diklat yang mengembangkan kompetensinya, terutama untuk jabatan-jabatan yang harus sertifikasi.

SS.7 Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas komunikasi publik serta penanganan masalah hukum secara tepat waktu dan profesional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan persepsi publik yang positif terhadap DJKN dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks penanganan permasalahan hukum	7a-CP	100	114,35	114,35
2.	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	7b-N	80	116,5	145,63

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%)

Bobot komponen: 80%

Target komponen: 85

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat relaas gugatan/panggilan sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat belum terdapat putusan
- Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025

2. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Bobot komponen: 20%

Target komponen: 90

Putusan adalah putusan atas

- perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen: Perkara N saat sudah terdapat putusan

Adapun *trajectory* Indeks penanganan permasalahan hukum Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Nama IKU: Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max AVG
Realisasi	113,77	112,86	112,86	114,76	114,76	114,35	114,35	
Capaian	113,77%	112,86%	112,86%	114,76%	114,76%	114,35%	114,35%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	114,53
2024	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, tidak terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, dan Standar Nasional.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu melakukan inventarisasi perkara berdasarkan tahapan penanganan dan putusan pengadilan serta melakukan monitoring posisi perkara melalui SIPP Pengadilan.

Target IKU Indeks penanganan permasalahan hukum **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. SDM dengan kompetensi yang baik;
2. Sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai;
3. Kerja sama, koordinasi dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** koordinasi dengan Pengadilan terkait status perkara (penelusuran perkara) dan koordinasi dengan Biro Advokasi terkait dukungan penanganan perkara

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Layanan bantuan hukum	42.360.000	40.086.226	Telah dilaksanakan kegiatan penanganan perkara

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain adanya putusan pengadilan yang kalah.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Tahapan penanganan perkara dan terbitnya putusan mengikuti jadwal dari Pengadilan dan sangat dipengaruhi oleh kontribusi para pihak.
2. Terdapat Pengadilan yang administrasinya kurang baik (baik persuratan maupun SIPP), misalnya terkait pemberitahuan putusan yang terlambat.
3. Terdapat Pengadilan yang SIPP-nya susah diakses atau tidak *update*.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana telah ditempuh dalam kurun waktu tahun 2025 dan melakukan upaya perbaikan bilamana diperlukan untuk menyesuaikan dengan peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2026.

7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110

Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing *website* untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Trajectory Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	Nama IKU: Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max AVG
Realisasi	118	116	117	116	116,5	116	116,5	
Capaian	147,5%	145%	146,25%	145%	145,62%	145%	145,63%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	116,5
2024	80	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, dan Standar Nasional.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait penyampaian informasi publik;
2. Mengikuti diskusi tentang simulasi permintaan informasi publik;
3. Koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait pemutakhiran data informasi publik yang disajikan di *website* KPKNL Tangerang I.

Target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengumpulan data untuk pemutakhiran data informasi publik yang disajikan di *website* KPKNL Tangerang I;
2. Menindaklanjuti surat masuk terkait permintaan informasi publik;
3. Melakukan pemutakhiran informasi publik secara tepat waktu di tiap triwulan.

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	3.905.000	3.793.900	Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan/edukasi publik kepada masyarakat umum terkait tusi KPKNL Tangerang I

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini antara lain melakukan pengumpulan dokumen yang akan disajikan pada pemutakhiran informasi publik dan pengiriman tiket Halo DJKN terkait adanya kendala dalam penggunaan aplikasi CMS DJKN.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu adanya kendala pada sistem aplikasi CMS saat melakukan pemutakhiran data informasi publik di web dan belum meratanya pemahaman SDM DJKN terkait tahapan penyelesaian permintaan Informasi Publik.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Adapun **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain menyiapkan dokumen yang akan disajikan pada informasi publik dan mempelajari daftar informasi publik yang dikecualikan.

SS.8 Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Sasaran ini mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas. Fokusnya adalah pada keberlanjutan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tangerang I mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Kode IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	8a-N	80	98,03	122,54

2.	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	8b-N	100	120	120
----	---	------	-----	-----	-----

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Adapun *trajectory* IKU **Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko** Tahun 2025 adalah:

KPKNL Tangerang I	Nama Sasaran Strategis: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	Nama IKU: Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max AVG
Realisasi	98,13	97,5	97,5	98,23	98,23	98,03	98,03	
Capaian	122,66%	121,87%	121,87%	122,79%	122,79%	122,54%	122,54%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80	-	-	-	-	98,03
2024	85	-	-	-	-	94,74
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, tidak terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, dan Standar Nasional.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengisian aplikasi Incrima;
2. Melaksanakan kegiatan *one on one* meeting dengan narasumber Kepala Seksi Kepatuhan Internal;
3. Pelaksanaan Rapat Capaian Kinerja, Manajemen Risiko dan Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan.

Target IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain memberikan edukasi kinerja pegawai dan organisasi melalui berbagai media dan pemanfaatan *site* kinerja sebagai salah satu media pendukung pengelolaan kinerja pegawai dan organisasi.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan terlaksananya berbagai **program/kegiatan** antara lain:

1. Kegiatan edukasi kepada para pegawai di lingkungan KPKNL Tangerang I dalam pelaksanaan dan pemenuhan data dukung dalam pengelolaan kinerja;
2. Pelatihan/diklat terkait manajemen kinerja dan risiko;
3. Sosialisasi terkait manajemen kinerja dan risiko kepada seluruh pegawai;
4. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target melalui Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana aksi.

Sedangkan **efisiensi** atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	7.948.000	6.332.884	Telah dihasilkan berbagai rekomendasi terkait Kepatuhan Internal diantaranya tindak lanjut atas pengaduan, analisis hasil pengumpulan bahan dan keterangan, dokumen rutin lainnya

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini antara lain mengidentifikasi dan menyusun peta risiko bersama unit lainnya serta mengadakan Rapat Capaian Kinerja, Manajemen Risiko dan Dialog Kinerja Organisasi.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu padatnya tugas teknis mengakibatkan administrasi pengelolaan kinerja dan risiko kurang mendapat perhatian sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dokumen pelaksanaan.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Adapun **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain pengoptimalkan penggunaan teknologi sebagai salah satu sarana pengelolaan kinerja pegawai dan kinerja organisasi.

8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
4. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Adapun *trajectory* IKU **Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI- WBK/WBBM** Tahun 2025 adalah:

KPKNL	Nama Sasaran Strategis: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif
Tangerang I	Nama IKU: Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Poi/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	110	110	120	120	120	120	
Capaian	100%	110%	110%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra DJKN	Renstra Kemenkeu	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	-	-	-	-	120
2024	-	-	-	-	-	-
2023	100	-	-	-	-	100
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, tidak terdapat proses **alignment** antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN, Rencana Strategis Kemenkeu, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa **extra effort** yang telah dilakukan yaitu senantiasa rutin mengingatkan dan mendorong para pegawai untuk memaknai dan menjaga semangat transformasi kelembagaan melalui pembangunan ZI-WBK/WBBM yang dilaksanakan secara rutin baik dalam rapat khusus maupun kegiatan kantor sehari-hari.

Target IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI- WBK/WBBM **berhasil** dicapai dengan baik karena beberapa hal antara lain telah disusunnya SK Tim keberlanjutan WBBM berikut rencana kerja serta kesadaran dari masing-masing Pegawai untuk senantiasa meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan.

Selain itu, keberhasilan dalam mencapai hasil kinerja juga didukung dengan **kegiatan** monitoring dan evaluasi berkala yang dilaksanakan setiap bulan, serta kegiatan *public campaign* yang ditujukan kepada masyarakat pengguna layanan KPKNL Tangerang I.

Sedangkan **efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya** dalam mencapai IKU ini dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan rapat monitoring secara *online* yang tentu sangat menghemat anggaran.

Adapun **mitigasi risiko** yang telah disusun atas pencapaian IKU ini selama 2025 antara lain kurang optimalnya implementasi rencana kerja keberlanjutan ZIWBK/WBBM diawali.

Namun masih terdapat **kendala**/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu pengaturan lini masa penilaian dan tenggat waktu *upload* dokumen yang pendek menyebabkan kendala teknis.

Dalam pencapaian target IKU, **GEDSI** yang diterapkan antara lain:

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I 2025

1. Seluruh pegawai di KPKNL Tangerang I dilatih untuk memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa memandang *gender*;
2. APT KPKNL Tangerang I dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas;
3. Proses bisnis KPKNL Tangerang I memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan informasi.

Guna meningkatkan kinerja di 2026, **rencana aksi** pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan sebagaimana telah ditempuh dalam kurun waktu tahun 2025 dan melakukan upaya perbaikan bilamana diperlukan untuk menyesuaikan dengan peluang, tantangan, dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2026.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA KPKNL Tangerang I Tahun 2025 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp2.073.635.360,- atau 94,82% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp2.187.005.000,- . Realisasi per-jenis belanja KPKNL Tangerang I Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

JENIS BELANJA	PAGU REVISI	REALISASI	% PENYERAPAN
Belanja Barang	1.946.354.000	1.932.641.360	99,29%
Belanja Modal	240.651.000	140.994.000	58,59%
Total	2.187.005.000	2.073.635.360	94,82%

Selain itu pada tahun anggaran 2025, KPKNL Tangerang I melaksanakan 6 kegiatan dengan rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			
1	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	14.978.000	6.461.000
2	Pengelolaan Aset	206.471.000	177.388.000
Program Dukungan Manajemen			
3	Legislasi dan Litigasi	42.360.000	40.086.226
4	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.911.343.000	1.839.573.350
5	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	3.905.000	3.793.900
6	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	7.948.000	6.332.884

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Beberapa kebijakan pada Kementerian Keuangan yang berimplikasi pada efisiensi sumber daya antara lain terkait:

1. Implementasi Kebijakan *Negative Growth* SDM

Dalam mengatasi adanya kebijakan *negative growth* SDM, KPKNL Tangerang I menerapkan sistem perbantuan antar subbagian/seksi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai di setiap subbagian/seksi.

2. Sistem Kerja Fleksibel

Kebijakan FWS bagi pegawai KPKNL Tangerang I berupa kebijakan WFH cukup berdampak positif pada kondisi psikologi pegawai namun belum berdampak cukup signifikan bagi efisiensi sumber daya organisasi.

3. Transformasi Digital Lingkup Kementerian Keuangan

Adanya transformasi digital di Kementerian Keuangan, sangat berdampak pada efisiensi sumber daya manusia, waktu, dan biaya. Meskipun adanya tambahan ke biaya internet dan jaringan, namun lebih banyak manfaat yang dirasakan baik oleh pegawai maupun organisasinya.

4. Program penataan kendaraan dinas

KPKNL Tangerang I menerapkan kebijakan sentralisasi penggunaan kendaraan dinas. Hal ini dirasakan cukup berdampak positif dikarenakan kendaraan dinas lebih terawat sehingga meminimalisir adanya biaya pengeluaran besar untuk perbaikan kendaraan selain itu penggunaan kendaraan dinas menjadi lebih tepat sasaran.

D. Kinerja Lain-Lain

1. Penghargaan/*Achievement* KPKNL Tangerang I selama Tahun 2025



- Penghargaan atas Capaian Persentase BMN berupa Tanah yang Disertipikatkan Tertinggi dari Kantor Wilayah DJKN Banten;
- Penghargaan atas Pencapaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Biad PN) dan Penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara Tertinggi Tahun 2025 dari Kantor Wilayah DJKN Banten;
- Penghargaan sebagai Pengelola Kearsipan Terbaik Tahun 2025;
- Penghargaan sebagai Pengelola Kinerja Pegawai Terbaik Tahun 2025; dan
- Penghargaan atas Pengelolaan Website dan Media Sosial Teraktif Tahun 2025.

2. Penerapan Parameter *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

- Kegiatan berbagi di bulan Ramadhan



- Kegiatan bazaar Ramadhan



- *Public campaign* dalam rangka “*Integrity Week*”



- Kegiatan *Family day* KPKNL Tangerang I



- *Public campaign* pada “Festival Pintu Air”



- Kegiatan Kemenkeu Mengajar



- Pemberian tali kasih DJKN kepada pegawai pensiunan DJKN





04.

Penutup

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang I disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang I selama tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 diawali dengan penetapan indikator kinerja KPKNL Tangerang I, yang merupakan salah satu *tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kemudian, di sepanjang tahun 2025, pencapaian kinerja yang berhasil diraih merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran KPKNL Tangerang I dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat dinamis. Pada tahun ini KPKNL Tangerang I berfokus pada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Termasuk di dalamnya, optimalisasi penggunaan aset negara dan peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. KPKNL Tangerang I juga terus mengembangkan kualitas layanan yang terdigitalisasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Pengawasan dan pengendalian juga senantiasa ditingkatkan agar layanan yang dihasilkan dapat diakses oleh seluruh pengguna layanan dari berbagai lapisan masyarakat.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Tangerang I, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian KPKNL Tangerang I dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



Lampiran

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



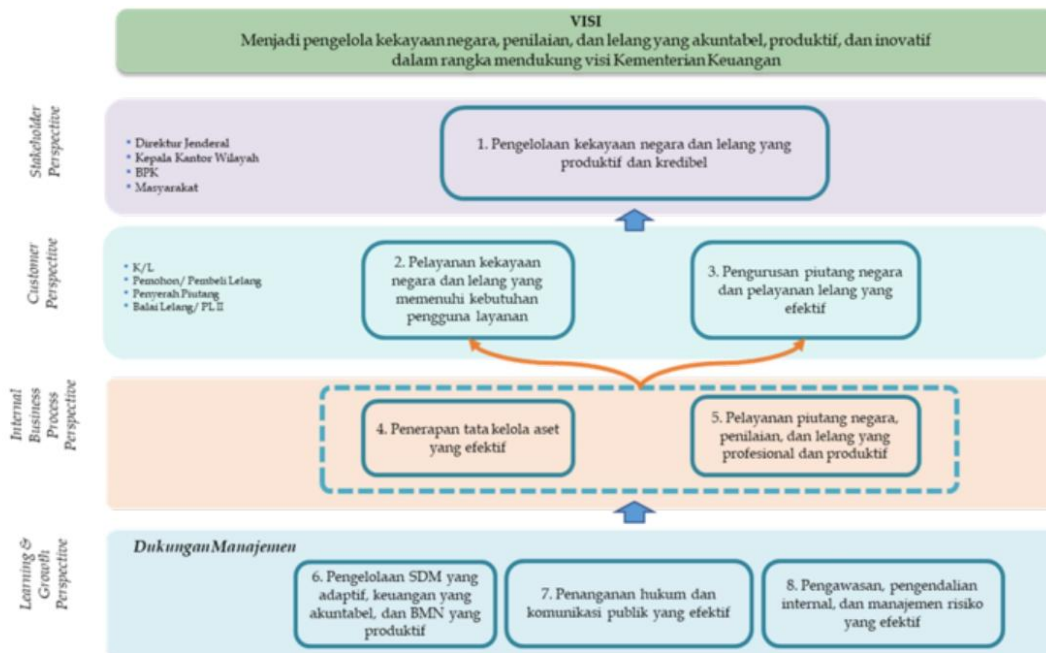
**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-02/WKN.06/2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TANGERANG I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TANGERANG I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp35M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp5,5 M)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp285M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

Anggaran

Rp371,780,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp39,889,000
2. Pengelolaan Aset	Rp331,891,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp2,602,465,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp38,812,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,528,237,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp19,508,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp15,908,000

Tangerang, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Banten



Ditandatangani Secara Elektronik
Djanurindro Wibowo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Tangerang I



Ditandatangani Secara Elektronik
Sunu Subroto



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TANGERANG I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp35M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,5 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp285M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Tangerang, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I



Ditandatangani Secara Elektronik
Sunu Subroto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)

Tangerang, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I



Ditandatangani Secara Elektronik
Sunu Subroto

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



2. Formulir Pengukuran Kinerja

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL Tangerang I
Periode s.d Triwulan IV 2025**

Kode	IKU	Target s.d	Realisasi s.d	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
		Triwulan IV	Triwulan IV		
Stakeholder Perspective (30%)					
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya				
1b-CP	Indeks Integritas	100,00	105,29	105,29	105,29
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	133,85%	133,85	120,00
Customer Perspective (20%)					
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal				
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%	126,66%	126,66	120,00
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	126,42%	126,42	120,00
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100,00%	105,89%	105,89	105,89
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77,00	96,19	124,93	120,00
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	97,31	131,50	120,00
Internal Process Perspective (25%)					
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif				
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100,00%	137,50%	137,50	120,00
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%	110,00%	110,00	110,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	116,72%	116,72	116,72
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	103,63%	148,04	120,00
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80,00%	120,00%	150,00	120,00
Learning and Growth Perspective (25%)					
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00	120,00
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	125,22	125,22	120,00
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	93,20%	116,50	116,50
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	114,35	114,35	114,35
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00	116,50	145,63	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	98,03	122,54	120,00
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00	120,00	120,00	120,00

3. Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dan Kinerja

LAPORAN REALISASI KINERJA
Tahun Anggaran 2025

Periode s/d bulan : 2025-12
 Kementerian Negara/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
 Eselon 1 : 015.09 - DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah/Provinsi : 29.51 - KOTA TANGERANGBANTEN
 Satuan Kerja : 506188 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG I

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 04-02-2026

Kode	Uraian	BELANJA			Persentase	Target	KELUARAN			GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase			Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	3.194.082.000,00	2.073.534.360,00	64,92%								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	3.194.082.000,00	2.073.534.360,00	64,92%								
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	263.563.000,00	183.748.000,00	69,72%								
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	35.622.000,00	6.461.000,00	18,14%								
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	35.622.000,00	6.461.000,00	18,14%								
001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	20.428.000,00	2.986.000,00	14,62%	15.0000	Orang	15.0000	100%	85,38%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan sudah selesai	
002	Sosialisasi Pengelolaan Puitang Negara	4.250.000,00	1.475.000,00	34,71%	10.0000	Orang	10.0000	100%	65,29%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	10.944.000,00	2.000.000,00	18,27%	10.0000	Orang	10.0000	100%	81,73%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	
4798	Pengelolaan Aset	227.941.000,00	177.287.000,00	77,78%								
AAH	Peraturan lainnya	142.222.000,00	108.931.500,00	76,59%								
001	Keputusan Pemohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	78.680.000,00	65.657.500,00	83,47%	50.0000	Surat Keputusan	50.0000	100%	16,53%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Sampai dengan Bulan Desember 2025 Capaian Progres Rincian Output sebesar 100%	

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
002	Keluaran Hasil Pengurusan/Pengelolaan Puitang Negara	63,562,000.00	43,274,000.00	68.08%	15,000	Surat Keputusan	15,000	100%	31.92%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Sampai dengan Bulan Desember 2025 Capaian Progres Rincian Output sebesar 100%
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	8,510,000.00	7,832,000.00	92.03%							
002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	8,510,000.00	7,832,000.00	92.03%	80,000	Rekomendasi Kebijakan	80,000	100%	7.97%	(00)	Sampai dengan Bulan Desember 2025 Realisasi PCRO sebesar 100 persen.
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	23,938,000.00	21,482,000.00	89.74%							
001	Risalah Lelang	23,938,000.00	21,482,000.00	89.74%	500,000	Dokumen	500,000	100%	10.26%	(00)	Sampai dengan bulan Desember 2025 PCRO sebesar 100%
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	43,310,000.00	31,033,500.00	71.65%							
004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	14,560,000.00	11,475,000.00	78.81%	1,000	Rekomendasi	1,000	100%	21.19%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota
005	Rekomendasi Hasil Penilaian	16,752,000.00	16,302,000.00	97.31%	2,000	Rekomendasi	2,000	100%	2.69%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Sampai dengan Bulan Desember 2025 Capaian Progress Rincian Output sebesar 100 persen
007	Penggalan Potensi Lelang	11,988,000.00	3,256,500.00	27.14%	1,000	Rekomendasi	1,000	100%	72.86%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Perjalanan Dinas Dalam Kota
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	9,961,000.00	8,005,000.00	80.39%							
201	Rekomendasi BNN/ Benapa Tanah yang Disertipkakan (PT)	9,961,000.00	8,005,000.00	80.39%	41,000	Rekomendasi	41,000	100%	19.61%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
WA	Program Dukungan Manajemen	2,930,519,000.00	1,889,785,360.00	64.49%							
4700	Legislasi dan Litigasi	50,360,000.00	40,086,226.00	79.6%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	50,360,000.00	40,086,226.00	79.6%							
969	Layanan Bantuan Hukum	50,360,000.00	40,086,226.00	79.6%	20,000	Layanan	20,000	100%	20.4%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota
4701	Pengelolaan Keuangan, BNN, dan Umum	2,852,889,000.00	1,839,573,360.00	64.48%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,937,265,000.00	1,695,016,301.00	87.5%							
002	Kerumahanggaan	102,568,000.00	80,779,685.00	78.76%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	21.24%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
994	Layanan Perkantoran	1,834,701,000.00	1,614,235,616.00	87.98%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	12.02%	(00)	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	915,620,000.00	144,558,049.00	15.79%							
001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	240,851,000.00	144,558,049.00	60.07%	35.0000	Unit	35.0000	100%	39.93%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
004	Gedung/Bangunan	674,969,000.00	0.00	0%	149.0000	M2	149.0000	2%	2%	(00)	Tidak dapat direalisasikan karena seluruh anggaran diblokir.
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	11,330,000.00	3,793,900.00	33.49%							
BMB	Komunikasi Publik	11,330,000.00	3,793,900.00	33.49%							
001	Pembinaan/Edukasi Publik	2,470,000.00	485,000.00	19.64%	70.0000	Orang	70.0000	100%	80.36%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
002	Kehumasan	6,810,000.00	2,818,000.00	41.38%	5.0000	Kegiatan	5.0000	100%	58.62%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
003	Pameran/Eksibisi	2,050,000.00	490,900.00	23.95%	1.0000	Kegiatan	1.0000	100%	76.05%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan telah selesai dilaksanakan
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	15,940,000.00	6,332,884.00	39.73%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,940,000.00	6,332,884.00	39.73%							
001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	15,940,000.00	6,332,884.00	39.73%	5.0000	Dokumen	5.0000	100%	60.27%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Kegiatan telah selesai dilaksanakan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA